

DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN



Lamongan
Megilan

Kecamatan
Sambeng

2025



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keaneka ragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai Pemerintah daerah.

Dalam Renstra PD Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Perencanaan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendekatan Top Down dan Bottom Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang. Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Frencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamongan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031
26. Paraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025
27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2024;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan Awal Recana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng Tahun 2025 berdasarkan rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan dalam Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan penyusunan rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambeng

Bab. I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sambeng, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisa Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Riview terhadap awal PD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD, Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja PD, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, serta Program dan Kegiatan PD.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Tabel Program dan Kegiatan .

Bab. V Penutup

Berisi tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kecamatan Sambeng telah mengevaluasi Kinerja tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022, Kecamatan Sambeng mempunyai program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,721,480,928	2.491.750.571	91,56%

2	PROGRAM; PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000	6,533,100	43,55%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN	48,087,800	43,851,300	91,19%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000	4,420,000	44,2%
5	PROGRAM; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45,064,272	31,619,700	70,17%

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja/Keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor penyebab:

- Pagu Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik utamanya listrik disebabkan voltase yang ada masih dibawah kebutuhan sehingga kurang maksimal penyerapannya,
- Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sambeng
- Kecamatan sebagai PD belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran PD, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui PD terkait.

- Masih kurang optimal sarana alat untuk kegiatan operasional di Kecamatan Sambeng.
- Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tak layak pakai sehingga pekerjaan kurang optimal.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Faktor penyebab:

- Masih banyak masyarakat di Kecamatan Sambeng yang belum mengerti tentang pentingnya administrasi kependudukan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Faktor penyebab:

- Masih banyak masyarakat di Kecamatan Sambeng yang belum mengerti tentang pentingnya musyawarah rencana pembangunan.
- Kurangnya tingkat kehadiran dalam musrenbang di Desa.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Faktor penyebab:

- Kurangnya personil pada bagian ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Sambeng.
- Kurangnya personil Linmas di masing-masing desa dan linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Sambeng.

E. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Faktor penyebab:

- masih ada desa yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan laporan APBD Desa.
- Kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun APBD Desa.
- Pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum bisa terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat (RTM).

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Meningkatnya peran masyarakat dalam Kegiatan Desa.
3. Meningkatnya musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
4. Meningkatnya peran serta kepemudaan di bidang olahraga dan seni budaya sehingga mendapatkan prestasi di tingkat Kecamatan Kabupaten Provinsi maupun di tingkat nasional.
5. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan, tertibnya para pedagang kaki lima dan para pengusaha industri sudah banyak yang memiliki ijin usaha, terbebas dari mirasdan narkoba.
6. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jembatan dan jalan poros desa, jalan-jalan dusun, kantor desa, balai desa dan jalan lingkungan RT.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Sambeng
- Pemenuhan sarana dan prasarana
- Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mengelola anggaran operasional dan anggaran dana pembangunan di Kecamatan.

B. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kebijakan:

- Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara continue dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
- Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
- perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.

- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
- Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri dan non industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Triwulan I Tahun 2025
Kecamatan Sambeng - Kabupaten Lamongan

No	Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra PD s/d 2024	
1	2				3	4	5		6		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Rp	K	Rp						
	7	0	1		A.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	7	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja											

					Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5 Jenis servis	5 Jenis servis	5 Jenis servis	5 Jenis servis			5 Jenis servis	5 Jenis servis	
							1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2	1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2	1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2	1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2		1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2	1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2	1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2	
							10 Orang tenaga teknis	10 Orang tenaga teknis	10 Orang tenaga teknis	10 Orang tenaga teknis		10 Orang tenaga teknis	10 Orang tenaga teknis	10 Orang tenaga teknis	
							250 materai	250 materai	250 materai	250 materai		250 materai @10.000	250 materai @10.000	250 materai @10.000	

							250 materai @10.00 0		@10.00 0	@10.00 0	@10.00 0				
	6	0 1	1	2	Penyediaan barang pakai habis perkantoran Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah barang pakai habis yang tercukupi Jumlah barang cetakan dan pengadaan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan	-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan	-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan	-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan	100%	-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan	-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan	100%

					perundang-undangan Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah ATK yang dicukupi		-41 jenis ATK		-41 jenis ATK	-41 jenis ATK	-41 jenis ATK		-41 jenis ATK	-41 jenis ATK	
	6	20	2		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6	20	2	9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor -Penyediaan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan		4 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
								2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	

					-Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair yang dicukupi										
	6	20	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor		1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100 %
	6	20	2	43	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi		2 Unit		-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
	6	20	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		1 Unit Mobil 5 Unit Sepeda motor		1 Unit Mobil 5 Unit Sepeda motor	1 Unit Mobil 5 Unit Sepeda motor	1 Unit Mobil 5 Unit Sepeda motor	100%	1 Unit Mobil 5 Unit Sepeda motor	1 Unit Mobil 5 Unit Sepeda motor	100 %

	6	2 0	6		Program : peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6	2 0	6	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pelatihan yang diikuti		2 Orang		-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	100 %
	6	2 0	6		Program : peningkatan pengemban n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6	2 0	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan yang tersusun dan terkirim		4 Lap		4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	100%

	6	20	6	6	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun		4 Dok		4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100 %
	6	8	15		Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6	8	15	2	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu yang dibutuhkan		3 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100 %
	6	8	17		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

						ketertiban sosial dan pembangunan										
	6	8	1 7	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan yang disetujui dalam kegiatan musrenbang		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
	6	8	1 7	2	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah desa berorganisasi kepemudaan yang dibina		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
	6	8	1 7	3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah satgas Linmas yang dibina		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
	6	8	1 7	4	Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	Jumlah desa yang membuat Perdes sesuai dengan Peraturan		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %

	6	8	1 7	5	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibangun dalam pemeliharaan berkala program ADD		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
	6	8	1 7	6	Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat	Jumlah desa yang berprestasi dibidang kebersihan		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
	6	8	1 7	11	Fasilitasi Kemiskinan	Jumlah orang miskin yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
	6	8	1 7	18	Fasilitasi Dana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pendampingan Dana Desa		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %

	6	8	1 7	20	Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi	Jumlah Desa yang di fasilitasi		22 Desa		22 Desa	22 Desa	22 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100 %
--	---	---	--------	----	--	--------------------------------------	--	---------	--	---------	---------	---------	------	---------	---------	-------

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Struktur organisasi Kecamatan Sambeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat Sambeng dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 (empat) orang Kepala Seksi serta 2 (dua) kasubbag.

Tugas camat/Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.

Fungsi camat adalah sebagai:

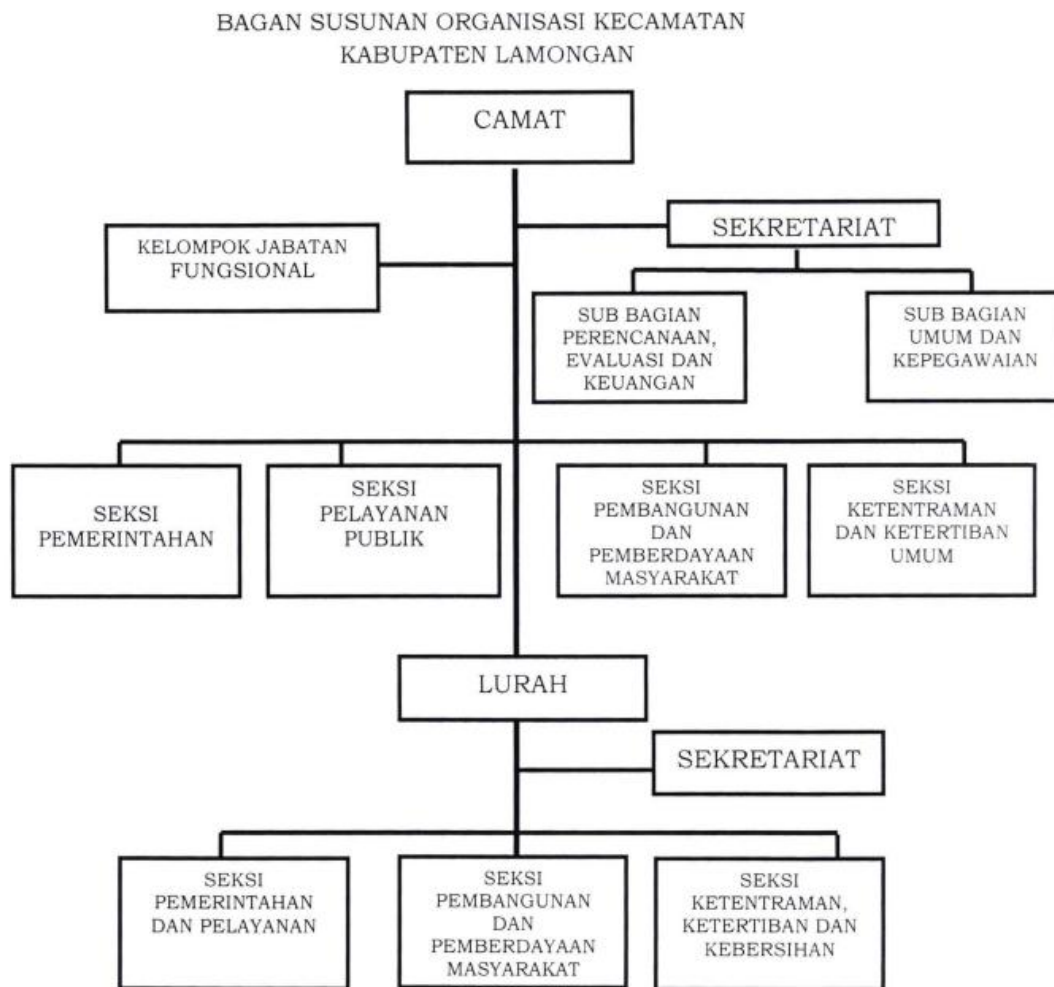
1. Pengkoordinasian segala kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang terpadu di tingkat Kecamatan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Kecamatan.
4. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Melaksanankan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas camat sebagai unsur staf pemerintahan daerah/satuan kerja pemerintahan daerah adalah berkedudukan membantu kepala daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan, camat bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 85 tahun 2020 tentang struktur organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:



Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,95	-	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
2.	Nilai SAKIP Kecamatan	A	B	A	A	A	A	A	A
3.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	50,00%	-	55,00%	56,00%	58,00%	59,00%	60,00%	61,00%

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Sambeng sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Sambeng merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sambeng

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Sambeng antara lain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam tugas-tugas pelayanan belum maksimal disebabkan:
 - Sarana komputer masih terbatas (kurang)
 - Gedung dan ruangan kantor masih diperlukan perbaikan
2. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sambeng karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
3. Pembangunan infrastruktur di kecamatan Sambeng sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sambeng terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
4. Di Kecamatan Sambeng masih terdapat desa yang belum ada sekretaris desanya antara lain: desa wonorejo, desa wudi, desa Kreteranggon, desa selorejo, dan Gempolmanis sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa diperlukan adanya pengisian jabatan Sekretaris Desa.

2.3.2 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Sambeng terhadap capaian program pemerintah kabupaten Lamongan di bidang pemerintahan. Pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan umum dan ketertiban masyarakat.

- a. Meningkatnya keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
 - 1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi, dan kepala desa se-Kecamatan Sambeng setiap bulan.
 - 2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Sambeng setiap bulan.
 - 3. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Sambeng setiap bulan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 1. Melakukan monitoring pendistribusian ranstra
 - 2. Pelayanan pendistribusian dana BLT, PKH, dan penyaluran bantuan pendidikan GNOTA kepada para siswa siswi tidak mampu yang berprestasi.
 - 3. Mengkoordinir penjaringan data Kartu Sehat Kartu Pintar
 - 4. Pelayanan surat permohonan bantuan sarana sosial
- c. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan
 - 1. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, jembatan dan jalan poros desa, pembangunan jalan lingkungan dan balai desa.
 - 2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pelaporan.
- d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima.
- e. Meningkatnya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
 - 1. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, rapat staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari jum'at dan apel pagi/sore setiap hari kerja serta evaluasi dan analisa beban kerja.
 - 2. Mengikutsertakan diklat PIM bagi pegawai yang menduduki jabatan serta pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.
- f. Meningkatnya pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Sambeng .

1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah kepada masyarakat.
2. Terwujudnya penanggulangan dan penanganan bencana alam di wilayah Kecamatan Sambeng.
3. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sambeng

Peningkatan pelayanan masyarakat Kecamatan Sambeng memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal itu diperlukan analisi yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Treats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Sambeng didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Kekuatan (Strengths)
 - Tersedianya jumlah SDM
 - Terciptanya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat
2. Kelemahan (weakness)
 - Pelayanan masih belum prima
 - Sarana dan prasarana yang terbatas
 - Administrasi belum tertib
3. Peluang (opportunities)
 - Berkembangnya pemukimn yang dihuni oleh masyarakat terdidik
 - Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - Berkembangnya sarana perekonomian
 - Kondisi masyarakat yang heterogen
 - Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
4. Ancaman (treats)
 - Keamanan dan ketertiban yang rawan
 - Bencana alam

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
6. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
7. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK.

2.4 Review Terhadap Awal RKPD Kecamatan Sambeng

1. Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (sistem bottom up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum. Sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsure Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.

2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN SAMBENG

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TAHUN 2025		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TAHUN 2025	
			TARGET	Rp.				TARGET	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan	80,20	87,00	2.515.271.860	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan	80,20	87,00	2.948.242.700

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	15 Dokumen 4 Laporan	15 Dokumen 4 Laporan	23.934.700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	15 Dokumen 4 Laporan	15 Dokumen 4 Laporan	13.604.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 SPJ Gaji 3 Laporan	14 SPJ Gaji 3 Laporan	2.009.613.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 SPJ Gaji 3 Laporan	14 SPJ Gaji 3 Laporan	2.199.415.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang Disiplin	35 Stel	35 Stel	29.673.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang Disiplin	35 Stel	35 Stel	29.673.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	115.063.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	135.713.700

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100%	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100%	100%	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	100%	100%	254.517.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	100%	100%	201.397.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	82.469.860	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	326.389.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentas e Penyeleng garaan Pelayana n Publik yang Tepat Waktu	100%	100 %	13.661.2 00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentas e Penyeleng garaan Pelayana n Publik yang Tepat Waktu	100%	100 %	5.065.40 0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan, IKM 80,20	15 Jenis Pelayanan, IKM 81,20	13.661.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan, IKM 80,20	15 Jenis Pelayanan, IKM 81,20	5.065.40

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentas e Desa yang Melaksan akan Pemberd ayaan Terhadap Masyarak at	100%	100 %	65.666.2 00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentas e Desa yang Melaksan akan Pemberd ayaan Terhadap Masyarak at	100%	100 %	17.052.2 00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberda yaan Desa	3 Kegiat an	3 Keg iata n	39.679.9 00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberda yaan Desa	3 Kegiat an	3 Keg iata n	5.197.90 0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				25.986.3 00	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberda yaan	3 Kegiat an	3 Keg iata n	11.854.3 00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentas e Konflik yang Tertanga ni	0	100 %	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentas e Konflik yang Tertanga ni	0	100 %	0

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	100 %	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	100 %	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	100 %	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	100 %	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100 %	4.366.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100 %	3.866.300

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	4.366.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	10.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa naik Kelas	20,00%	33,33%	20.953.900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa naik Kelas	20,00%	33,33%	16.066.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.953.900	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16.066.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambeng antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2025 oleh Kecamatan Sambeng adalah :

1. Program Nasional : Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Program OPD : Pengendalian Banjir
2. Program Nasional : -
Program OPD : Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Nasional : -
Program OPD : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Nasional : Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
Program OPD : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Nasional : Pemberdayaan Potensi keamanan
Program OPD : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Nasional : -
Program OPD : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program OPD : Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Program OPD : Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja
10. Program Nasional : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program OPD : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
11. Program Nasional : Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan
Program OPD : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambeng.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sambeng.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sambeng adalah sebagai berikut :

1). Tujuan .

Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran .

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

2). Tujuan .

Meningkatkan Kemandirian Desa

Sasaran .

Meningkatnya pemberdayaan Desa

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai IKM	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Kegiatan rutin	
				Program Penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan	Penyelenggaraan Urusan	Jumlah penyelenggaraan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Pelayanan
Meningkatkan Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Program Koordinasi Ketenteraman dan	Persentase Konflik yang tertangani	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentera

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ketertiban Umum		Ketertiban Umum	man dan Ketertiban Umum
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Urusan	Persentase Desa Naik Kelas	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan Desa		n dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

3.3. Program dan Kegiatan.

1.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Sambeng.

1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sambeng akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001 Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat. Program dan kegiatan dalam Tahun 2024 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN
PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Nomor						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
								Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	1	1				KECAMATAN							
6	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Kec. Sambeng	100%	290.000.000	APBD Kabupaten	100%	290.000.000
6	1	1	1	1		Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Perkantoran yang tercukupi	Kec. Sambeng	100%	170.000.000	APBD Kabupaten	100%	161.338.891

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli	Kec . Sam ben g	Materai @ 3000 233 lb, materai @ 6000 300 lb	2.756. 250	AP BD Ka b	Materai @ 3000 233 lb, materai @ 6000 300 lb	2.894. 063
					Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekenin g yang terbayar	Kec . Sam ben g	2 rekening	30.87 0.000	AP BD Ka b	2 rekening	32.413. 500
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkap an kantor yang dilaksan akan	Kec . Sam ben g	5 jenis servis	13.23 0.000	AP BD Ka b	5 jenis servis	13.891. 500
					Penyediaan Jasa Pemelihara an dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oper asional	Jumlah kendara an dinas yang bayar pajak	Kec . Sam ben g	1 unit mobil, 4 roda dua	2.205. 000	AP BD Ka b	1 unit mobil, 4 roda dua	2.315.2 50
					Penyediaan Jasa Tenaga Administra si/Teknis Kegiatan	Jumlah jasa tenaga adminis trasi/tek nis kegiatan	Kec . Sam ben g	10 Orang	104.5 94.83 7	AP BD Ka b	10 Orang	109.82 4.579
6	1	1	1	2	Penyediaa n Barang Pakai	Jumlah barang pakai	Kec . Sa	100%	120.0 00.00 0	AP BD	100%	104.88 0.826

					Habis Perkantoran	habis perkantoran yang tercukupi	mb eng			Ka b		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi	Kec . Sambeng	41 jenis	33.075.000	AP BD Ka b	41 jenis	34.728.750
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec . Sambeng	4 jenis	30.886.538	AP BD Ka b	4 jenis	32.430.865
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec . Sambeng	8 jenis	3.307.500	AP BD Ka b	8 jenis	3.472.875
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec . Sambeng	3 jenis	5.071.500	AP BD Ka b	3 jenis	5.325.075
					Penyediaan Makanan	Jumlah makanan dan	Kec . Sambeng	snack 1330 dus, nasi 370	27.545.963	AP BD	snack 1330 dus, nasi	28.923.261

						dan Minuman	minuman yang disediakan	ben g	dus, air mineral 11 dus		Ka b	370 dus, air mineral 11 dus	
6	1	1	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai	Kec . Sambeng	100%	1.360.000.000	AP BD Ka b	100%	1.398.032.213
6	1	1	2	3		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Kec . Sambeng	100%	50.000.000	AP BD Ka b	100%	50.000.000
6	1	1	2	4		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kec . Sambeng	1 unit	70.000.000	AP BD Ka b	1 unit	70.000.000
6	1	1	2	6		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung yang di rehabilitasi	Kec . Sambeng	2 unit	1.200.000.000	AP BD Ka b	2 unit	200.000.000
6	1	1	2	7		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeril haraan rutin berkala mobil dinas /	Kec . Sambeng	1 unit mobil 5 unit sepeda motor	40.000.000	AP BD Ka b	1 unit mobil 5 unit sepeda motor	40.000.000

						operasio nal						
6	1	1	5		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosent ase jumlah pengad aan pakaia n dinas	Kec . Sam ben g	25 setel	50.00 00.00 0	AP BD Ka b	25 setel	50.000. 000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkap any	Jumlah pengada an pakaian dinas beserta perleng kapanya	Kec . Sam ben g	25 setel	50.00 0.000	AP BD Ka b	25 setel	50.000. 000
6	1	1	5		Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosent ase Sumber Daya Aparat ur yang memili ki kompet ensi sesuai bidang nya	Kec . Sa mb eng	100%	15.00 0.000	AP BD Ka b	100%	15.000. 000
6	1	1	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengik uti pendidi kan dan pelatiha n	Kec . Sam ben g	2 orang	15.00 0.000	AP BD Ka b	2 orang	15.000. 000
6	1	1	6		Program Peningkat	Prosent ase	Kec .	100%		AP BD	100%	70.000. 000

						an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	jumlah dokum en perenca naan, laporan keuang an dan kinerja OPD yang tepat waktu	Sa mb eng		70.00 0.000	Ka b		
6	1	1	6	1	Penyusuna n Pelaporan Keuangan secara Berkala	Jumlah laporan keuanga n dan capaian kinerja yang tersusun	Kec . Sam ben g	4 laporan	30.00 0.000	AP BD Ka b	4 laporan	30.000. 000	
6	1	1	6	2	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n dan Evaluasi	Jumlah dokume n perenca naan dan evaluasi yang tersusun	Kec . Sam ben g	4 dokumen	40.00 0.000	AP BD Ka b	4 dokume n	40.000. 000	
6	1	1	1	5	Program Peningkat an Kualitas Pelayanan Kecamata n	Prosent ase pelayan an yang memen uhi SOP	Kec . Sa mb eng	100%	40.00 0.000	AP BD Ka b	100%	40.000. 000	
6	1	1	1	5	Pelayanan administras i terpadu kecamatan	Jumlah peralata n pelayan	Kec . Sam	3 Unit	40.00 0.000	AP BD Ka b	3 Unit	40.000. 000	

						an adminis trasi terpadu kecamatan yang dibutuh kan	ben g					
6	1	1	1	7	Program Peningkat an Kualitas Penyeleng garaan Pemerinta han dan Pembangu nan Kecamata n	Prosent ase jumlah koordin asi dan pembin aan di bidang Pemer intahan, Ketentr aman dan Keterti ban, Pereko nomian dan Pemba ngunan , Pember dayaan Masyar akat Desa	Kec . Sa mb eng	100%	341.0 00.00 0	AP BD Ka b	100%	341.00 0.000
6	1	1	1	7	Pelaksanaa n Musyawara h Perencanaa n	Jumlah Usulan yang dietujui dalam kegiatan	Kec . Sam ben g	22 Desa	44.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	44.000. 000

					Pembangu nan	munser bang						
6	1	1	1	2	Pembinaan organisasi kepemudaa n	Jumlah desa berorga nisasi kepemu daan yang dibina	Kec . Sam ben g	22 Desa	50.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	50.000. 000
6	1	1	1	3	Pengendali an keamanan lingkungan	Jumlah satgas linmas yang dibina	Kec . Sam ben g	22 Desa	33.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	33.000. 000
6	1	1	1	4	Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes	Jumlah desa yang sudah menyus un perdes sesuai dengan peratura n	Kec . Sam ben g	22 Desa	88.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	88.000. 000
6	1	1	1	5	Fasilitasi penyelengg araan pemerintah an desa	Jumlah desa yang dibina dalam pembina an berkala program ADD	Kec . Sam ben g	22 Desa	44.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	44.000. 000
6	1	1	1	1	Fasilitasi kemiskinan	Jumlah masyara kat miskin yang di	Kec . Sam	22 Desa	66.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	66.000. 000

						fasilitasi untuk mendap atkan bantuan	ben g							
6	1	1	1	2	7	0	Fasilitasi Pengemban gan Potensi Ekonomi	Jumlah Desa yang di fasilitasi	Kec . Sam ben g	22 Desa	16.00 0.000	AP BD Ka b	22 Desa	16.000. 000
Total											2.151. 000.0 00			1.969.2 86.117

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- b. Tabel rencana program dan kegiatan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Kecamatan	80,20	85,00	2.480.833.300	86,00	2.728.916.630
	7	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen dan Laporan tepat waktu	15 Dokumen 4 Laporan	15 Dokumen 4 Laporan	65.000.000	15 Dokumen 4 Laporan	71.500.000

Kecamatan	7	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 SPJ Gaji 3 Laporan	14 SPJ Gaji ; 3 Laporan	1.716.007.900	14 SPJ Gaji 3 Laporan	1.887.608.690
	7	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yag Disiplin	35 Stel	35 Stel	25.000.000	35 Stel	27.500.000
	7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100 %	89.638.200	100 %	98.602.020
	7	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100%	100 %	62.811.200	100 %	69.092.320

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	100%	100 %	390.383.000	100 %	429.421.300
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100 %	131.993.000	100 %	145.192.300
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100 %	31.549.900	100 %	34.704.890
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	15 Jenis Pelayanan, IKM 80,20	15 Jenis Pelayanan, IKM 81,00	31.549.900	15 Jenis Pelayanan, IKM 81,20	34.704.890

Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	48.603.200	100%	53.463.520
	7	0	0	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	48.603.200	3 Kegiatan	53.463.520
	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani	0	0	0	100%	22.100.000
	7	0	0	2	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	100%	13.000.000

7	0 1	0 4	2	0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	100 %	9.100.000
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100 %	17.000.000	100 %	18.700.000
7	0 1	0 5	2	0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100 %	17.000.000	100 %	18.700.000

	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa naik Kelas	20,00%	26,6 7%	48.000.800	33,3 3%	52.800.880
	7	0	0	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	48.000.800	15 Desa	52.800.880

BAB. V

PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Sambeng sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Sambeng merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

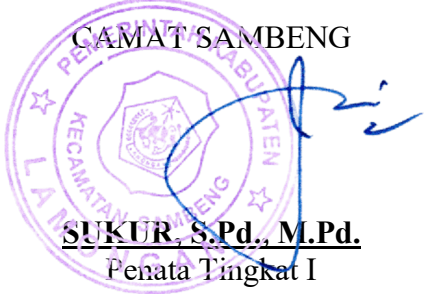
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Sambeng dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Sambeng pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 7 program, 17 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024

Rencana Kerja PD Kecamatan Sambeng tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian rencana kerja PD Kecamatan Sambeng tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum

rencana kerja PD Kecamatan Sambeng tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT SAMBENG



SUKUR, S.Pd., M.Pd.
Penata Tingkat I
NIP. 19680621 199304 1 001